

**POLITIK IDENTITAS DAN ARAH DEMOKRATISASI DI SUDAN
SELATAN**



Oleh:

**Ani Mariani
NIM: 19200010108**

TESIS

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**
Diajukan Kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Master of Arts (M.A)

**Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi Kajian Timur Tengah**

YOGYAKARTA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ani Mariani, S.IP
NIM : 19200010108
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Kajian Timur Tengah (KTT)

Menyatakan bahwa naskah tesis yang berjudul “Politik Idenitas dan Arah Demokratisasi Sudan Selatan” secara keseluruhan adalah benar-benar merupakan hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 23 Mei 2022
Saya yang menyatakan,



Ani Mariani, S.IP
NIM: 19200010108

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ani Mariani, S.IP
NIM : 19200010108
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Kajian Timur Tengah (KTT)

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 23 Mei 2022
Saya yang menyatakan,



Ani Mariani, S.IP
NIM: 19200010108

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-397/Un.02/DPPs/PP.00.9/06/2022

Tugas Akhir dengan judul : POLITIK IDENTITAS DAN ARAH DEMOKRATISASI DI SUDAN SELATAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANI MARIANI
Nomor Induk Mahasiswa : 19200010108
Telah diujikan pada : Selasa, 07 Juni 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 62afe583e5a3f



Penguji II

Mohammad Yunus, Lc., MA., Ph.D
SIGNED

Valid ID: 62a9a27357e6b



Penguji III

Dr. Moh. Mufid
SIGNED

Valid ID: 62afe59b0db7



Yogyakarta, 07 Juni 2022
UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62aff1db9562f

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

POLITIK IDENTITAS DAN ARAH DEMOKRATISASI DI SUDAN SELATAN

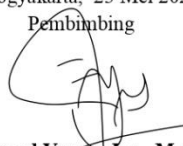
Yang ditulis oleh :

Nama	: Ani Mariani, S.IP
NIM	: 19200010108
Jenjang	: Magister (S2)
Program Studi	: Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi	: Kajian Timur Tengah (KTT)

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar *Master of Arts* (M.A)

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 23 Mei 2022
Pembimbing



Mohammad Yunus, L.c., M.A., Ph. D
NIP: 19800903 000000 1 301

MOTTO

**“Life is Never Made Unbearable by Cricumtances, But Only by Lack of
Meaning Purpose”**

“Even when it is not attained we become better by striving for a higher goal”

(Viktor E Frankl)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirobbil alamin....

Dengan Setulus Hati

Tesis Ini Saya Persembahkan Kepada

Kedua Orangtua yang sangat kukasihi dan kusayangi

BAPAK DAN MAMAH TERCINTA

yang tidak henti-hentinya mendo'akan saya setiap hari serta penyemangat saya saat suka maupun duka sehingga tugas akhir ini bisa terlesaikan dengan lancar

Kakak-kakak saya tercinta Uu Baedilah, Dedi Badrudin dan Darmawan

Mereka adalah motivasi dan panutan untuk saya sampai kapanpun

Yang Tersayang, Agus Hermanto yang senantiasa memberikan dukungannya untuk saya

Almamater Tercinta

Program Pascasarjana

Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi Kajian Timur Tengah

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga

Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia, rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis sebagaimana yang diharapkan. Shalawat serta salam semoga tetap teriring dan tucurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabat dan ummat yang senantiasa meneladani akhlakunya dan mengikuti risalah Islam yang dibawa olehnya sebagai ajaran yang haq lagi sempurna bagi manusia.

Penulisan tesis yang diberi judul **“POLITIK IDENTITAS DAN ARAH DEMOKRATISASI DI SUDAN SELATAN”** disusun oleh penulis dalam rangka memenuhi kewajiban tugas akhir untuk melengkapi syarat-syarat dalam memperoleh gelar *Master of Arts* (M.A) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan segala kerendahan hati dan kesadaran penuh, penulis sampaikan tesis ini tidak akan selesai tanpa bantuan serta dukungan dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. H Abdul Mustaqim, M. Ag., selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Ibu Dr. Nina Mariani Noor, M.A selaku Ketua Prodi Interdisciplinary

Islamic Studies UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

4. Bapak Mohammad Yunus, L.c., M.A., Ph. D., selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan karya ini.
5. Kedua orangtua saya, Eman Sulaeman dan Anah yang telah mengasuh, mendidik, membimbing dan membesarkan penulis dengan memberikan segala kasih sayangnya tanpa pamrih, serta mengiringi do'a di setiap langkah penulis.
6. Mas Firman dan Mba Iqo yang telah banyak berkontribusi dalam membantu penyusunan dan penyelesaian tesis ini.
7. Teruntuk sahabat-sahabat penulis, Apriliyani Harahap, Duli Qurratu A'yun, Shafira Husna, Rista Fauziah, Anisa Yulianti dan Siska Nurmala.
8. Seluruh dosen dan staf Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Serta semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuan, dukungan, semangat, dan do'a yang diberikan kepada penulis. Semoga segala kebaikan kalian mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari dengan sepenuhnya, atas segala keterbatasan ilmu sehingga tesis ini masih banyak kekurangan dan kesalahan serta jauh dari kata sempurna.

Sebagai penutup, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa

masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penulisan tesis ini baik dari aspek, substansi pembahasan maupun tata bahasa yang jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Maka dari itu penulis membutuhkan kritik serta saran yang membangun demi penyempurnaan tesis ini dan penelitian-penelitian semacam ini dimasa yang akan datang.

Yogyakarta, 23 Mei 2022
Penulis

Ani Mariani, S.IP
NIM: 19200010108



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Ani Mariani. NIM. 19200010108. *Politik Identitas dan Arah Demokratisasi di Sudan Selatan*. Tesis Program Pascasarjana Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies (IIS) Konsentrasi Kajian Timur Tengah (KTT) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022. Pembimbing: Mohammad Yunus, Lc., M.A., Ph. D.

Krisis politik melanda proses demokrasi Sudan Selatan yang di dominasi oleh *Sudan People's Liberation Movement/Army* dan hegemoni etnis Dinka. Hal ini terkonfirmasi dari peristiwa perang saudara pada tahun 2013 yang memberikan pengaruh signifikan terhadap arah demokrasi di Sudan Selatan. Disisi lain, pemerintah menghadapi banyak tantangan dan hambatan yang berkontribusi pada krisis yang terjadi.

Peneliti menggunakan teori demokrasi Jack Snyder dan Teori Relasi Kuasa Michel Foucault dalam menganalisis permasalahan seputar politik identitas dan demokratisasi di Sudan Selatan. Adapun metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *arkeologi* dan *genealogi*. bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai motif, makna dan kepentingan dibalik suatu peristiwa, dengan kata lain mencari variabel-variabel yang terkait dan tersembunyi. Melalui metode genealogi, dapat dilihat sebab-akibat antara variabel bebas (politik identitas politik di Sudan Selatan) dengan variabel terikat (arah demokrasi dan instabilitas sistem pemerintahan Sudan Selatan).

Hasil penelitian ini menemukan bahwa krisis politik yang terjadi di Sudan Selatan dipengaruhi oleh beberapa aspek, yakni propaganda elit, sengketa sumber daya minyak, intervensi aktor internasional, praktik autokasi SPLM/A dan hegemoni etnis Dinka. Kelima aspek tersebut saling terkait dan menjadi sumber krisis politik dan kompleksitas dalam proses demokrasi serta menjadi faktor penyebab adanya politik identitas di Sudan Selatan.

Kata Kunci: Demokrasi, Politik Identitas, Sudan Selatan.

ABSTRACT

Ani Mariani. NIM. 19200010108. *Identity Politics and Direction for Democratization in South Sudan.* Thesis of Postgraduate Program of Interdisciplinary Islamic Studies (IIS) Concentration of Middle East Studies (KTT) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021. Advisor: Mohammad Yunus, M.A., Ph. D.

The political crisis hit South Sudan's democratic process which was dominated by the Sudan People's Liberation Movement/Army and the hegemony of the Dinka ethnic group. This is confirmed by the events of the civil war in 2013 which had a significant influence on the direction of democracy in South Sudan. On the other side, the government faced many challenges and obstacles that contributed to the current crisis.

The researcher uses Jack Snyder's democracy theory and Michel Foucault's Power Relation Theory to analyze the problems surrounding identity politics and democratization in South Sudan. The research methodologies used in this research are archeology and genealogy. aims to further analyze the motives, meanings and interests behind an event, in other words looking for related and hidden variables. Through the genealogy method, it can be known the cause and effect between the independent variable (political identity politics in South Sudan) and the dependent variable (the direction of democracy and the instability of the South Sudanese government system).

The results of this study found that the political crisis that occurred in South Sudan was influenced by several aspects, those are elite propaganda, oil resource disputes, international actor intervention, SPLM/A authorization practices and Dinka ethnic hegemony. Those five aspects are interrelated and become a source of political crisis and complexity in the democratic process as well as a contributing factor to the existence of identity politics in South Sudan.

Keyword: Democracy, Identity Politic, South Sudan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	15
BAB I PENDAHULUAN.....	17
A. Latar Belakang	17
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	24
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	26
D. Tinjauan Pustaka	27
E. Kerangka Teoritis.....	33
F. Metode Penelitian.....	49
G. Sistematika Pembahasan	54
BAB II TRANSFORMASI SOSIAL DAN POLITIK SUDAN SELATAN... 56	
A. Pergolakan dan Revolusi	57
1. Gerakan Anya-Nya (1955-1972): Arab vs. Kulit Hitam dan Muslim vs. Kristen.....	61
2. Revolusi SPLM/A (1983-2005): Kediktatoran vs. Demokrasi dan Teokrasi vs. Sekularisme	65
3. <i>Comprehensive Peace Agreement</i> – CPA (2005-2011): Utara vs. Selatan dan Persatuan vs. Kemerdekaan	69
B. Potret Sudan Selatan Pasca Merdeka	71
C. Gelombang Demokratisasi di Sudan Selatan	79
D. Kesimpulan	84

BAB III SUDAN SELATAN DAN SUMBER DAYA: KOMPLEKSITAS AKTOR KEPENTINGAN	88
A. Krisis Internal Sudan Selatan	89
1. Konflik Politik	90
2. Konflik Ekonomi	96
3. Konflik Budaya	101
B. Krisis Eksternal Sudan Selatan	105
1. Sengketa Wilayah Perbatasan	106
2. Aktor Internasional dalam Rivalitas Sumber Daya Minyak.....	112
C. Sudan Selatan dalam Dinamika Politik Timur Tengah.....	122
D. Kesimpulan	127
BAB IV DINAMIKA POLITIK DAN ARAH DEMOKRATISASI SUDAN SELATAN.....	129
A. Problematika dan Konstruksi Narasi Politik Sudan Selatan	131
1. Sentimen Nasionalisme dalam Demokratisasi di Sudan Selatan	132
2. Persaingan Antarkelompok Masyarakat (<i>popular rivalries</i>).....	139
3. Propaganda Elite (<i>elite persuasion</i>).....	148
B. Lanskap Demokrasi Sudan Selatan	154
1. Autokrasi <i>Sudan People's Liberation Movement/Army</i> (SPLM/A).....	156
2. Hegemoni Etnis Dinka	159
C. Masa Depan Demokrasi Sudan Selatan	165
D. Kesimpulan	172
BAB V PENUTUP.....	176
A. Kesimpulan	176
B. Saran.....	178
C. Keterbatasan Penelitian	179
DAFTAR PUSTAKA	181
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	188

DAFTAR SINGKATAN

ARCSS	: <i>Agreement on the Resolution of the Conflict in the Republic of South Sudan</i>
AS	: Amerika Serikat
CPA	: <i>Comprehensive Peace Agreement</i>
DRC	: <i>Democratic Republic Congo</i>
DS	: <i>democratizing states</i>
GoNU	: <i>Government of National Unity</i>
GoS	: <i>Government of Sudan</i>
GoSS	: <i>Government of South Sudan</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
IBC	: <i>Independent Boundaries Commission</i>
IGAD	: <i>Intergovernmental Authority on Development</i>
MD	: <i>Mature Democracy</i>
MENA	: <i>Middle East North Africa</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-bangsa
Pemilu	: Pemilihan Umum
Perpres	: Peraturan Presiden
R-ARCSS	: <i>Revitalisation Agreement of the Resolution of the Conflict in the Republic of South Sudan</i>
RUU	: Rancangan Undang-undang
SAF	: <i>Sudan Armed Forces</i>
SARA	: Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan
SLPM	: <i>Sudan People's Liberation Movement</i>
SPLA	: <i>Sudan People's Liberation Army</i>
SPLA-N	: <i>Sudan People's Liberation Army-North</i>

SPLM/A-IO : *Sudan People's Liberation Movement/Army-In Oppotition*
SSLM/A : *South Sudan Liberation Movement/Army*
UEA : *Uni Emirat Arab*
UNMISS : *United Nations Missions in South Sudan*
UU : *Undang-undnag*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sudan Selatan telah mengalami transisi demokrasi sejak kemerdekaannya pada 9 Juli 2011 atau kurang lebih selama 1 dekade.¹ Sebagai negara yang mencapai kemerdekaan melalui perang saudara, Sudan Selatan menginginkan demokrasi sebagai konstitusi negara barunya.² Kebebasan menurut Amartya K. Sen erat kaitannya dengan demokrasi. Menurutnya, demokrasi memberikan kebebasan kepada manusia serta menjamin hak-hak dasar bagi masyarakat. Sen menekankan pentingnya kebebasan, keadilan dan hak politik masyarakat dalam demokrasi.³

Namun pada dasarnya, negara yang mengalami transisi demokrasi rentan mengalami konflik nasionalis, bahkan kegagalan demokrasi dan kehancuran negaranya. Hal tersebut biasanya dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan elite politik mengonsolidasikan demokrasi pasca peralihan kekuasaan. Disamping itu juga, munculnya berbagai konflik

¹ Sudan Selatan merupakan pecahan dari negara Sudan akibat perang saudara yang berlangsung sekitar 50 tahun (1955-2005). Isu ketidaksetaraan, kesukuan dan etnisitas merupakan sumber utama perang saudara di Sudan. Penduduk Sudan yang secara demografis dan kultural terpisah membuat isu ketidaksetaraan meluas menjadi perang saudara. Secara demografis, bagian Utara negara Sudan didominasi oleh bangsa Arab dan Muslim sedangkan di Selatan dihuni oleh mayoritas bangsa Afrika dan Kristen. Perbedaan tersebut membuat perang saudara tidak dapat dielakkan akibat ketidaksetaraan yang dilakukan Utara terhadap penduduk Selatan. (Sumber: Arif Setyanto, "Faktor Penyebab Konflik Pasca Partisi Sudan-Sudan Selatan Tahun 2011-2012", 93.)

² Dadang Supardan, "Sejarah dan Prospek Demokrasi", *Social Science Education Journal*, Vol. 2, No. 2 (2015), 129.

³ *Ibid.*, 131.

berbasis etnis serta proses demokrasi yang tidak disertai oleh peran budaya menjadi salah satu faktor penyebab kegagalan demokrasi.

Terciptanya pemerintahan yang demokratis membutuhkan waktu yang lama, bukan hanya bertahun-tahun tetapi puluhan tahun, bahkan hingga berlalunya satu generasi atau lebih. Sebagaimana pendapat Jack Snyder dan Chalmers Johnson menyebutkan bahwa ketidakseimbangan seringkali terjadi pada era transisi demokrasi. Dalam artian, suatu situasi dimana nilai-nilai, persepsi-persepsi atau kepercayaan-kepercayaan diantara para elite politik, masyarakat, institusi-institusi politik serta sistem ekonomi tidak tersinkronisasi dan tidak saling memperkuat. Oleh karenanya, dengan situasi tersebut, konflik-konflik politik seringkali berlangsung secara terbuka.⁴

Permasalahan dalam tahap transisi demokrasi merupakan hal yang tidak dapat dihindari oleh setiap negara. Berbagai tantangan kerap terjadi baik bagi negara yang telah lama merdeka, maupun negara yang baru merdeka. Hal ini dikarenakan masih bertahannya sistem dan nilai-nilai lama, seperti birokratisme, patronisme dan nepotisme,⁵ penyelewengan para elite,⁶ dan keberagaman etnik.⁷ Faktor lainnya yaitu kondisi kesejarahan dan budaya (*collective memories*), kondisi kemajemukan ideologi serta kondisi hubungan antara lembaga negara yang tidak sehat

⁴ Kris Nugroho, "Konsolidasi Demokrasi", *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik.*, Th. XIV, No. 2, (April 2001), 29.

⁵ Zeffry Alkatiri, "Perdebatan Teori Transisi Demokrasi", *Jurnal Wacana.*, Vol. 9, No. 1, (April 2007), 32.

⁶ *Ibid.*, 34.

⁷ *Ibid.*, 40.

(kekuasaan presiden dan kekuasaan parlemen). Krisis ekonomi, kondisi perang, chauvinisme dan munculnya nasionalisme radikal juga kerap menjadi tantangan lainnya.⁸ Fenomena tersebut merupakan hal yang dianggap lazim dalam masyarakat yang sedang memasuki transisi demokrasi.

Dalam fenomena di Sudan Selatan, telah banyak penelitian yang telah mengemukakan hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Sudan Selatan dalam proses transisi demokrasi. Diantaranya penelitian Carlo Koos dan Thea Gutschke yang mengungkapkan bahwa permasalahan kekerasan etnis, pemberontakan lokal, praktik otokratis dari SPLM yang dominan, korupsi hingga konflik perbatasan mengiringi proses transisi demokrasi Sudan Selatan.⁹ Penelitian lainnya mengemukakan bahwa pemerintah tidak memiliki visi strategis untuk menyatukan masyarakatnya yang terdiri dari lebih 60 kelompok etnis. Kelemahan tersebut telah mempersulit negara dalam membentuk identitas nasional,¹⁰ tidak adanya kemauan politik untuk memajukan negara,¹¹ adanya impunitas dan pengabaian yang disengaja terhadap hukum.¹²

⁸ *Ibid.*, 41.

⁹ Carlo Koos dan Thea Gutschke, "South Sudan's Newest War: When Two Old Men Divide a Nation", *German Institute of Global and Area Studies*, Number 2, (2014), 2.

¹⁰ Frahm dan Ole, "Defining the Nation: National Identity in South Sudanese Media Discourse" Dalam *Africa Spectrum*, GIGA German Institute of Global and Area Studies, 47, 1, 2012, 25.

¹¹ Abraham A. Awolich, "Fixing Governance is key to Stability in South Sudan", *Policy Brief*, Desember 2018, 7.

¹² Monica Duffy Toft, "A Legitimacy chain approach to security sector reform: Working for citizens and states", *The LSE-Oxford Commission on State Fragility, Growth and Development*, April 2018, 21.

Laporan lainnya menyebutkan bahwa pemerintah Sudan Selatan memiliki catatan kinerja yang sangat buruk dalam hal layanan dasar dan utama seperti kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, air dan sanitasi, energi dan infrastruktur.¹³ Infrastruktur dan layanan dasar yang telah ada hanya terkonsentrasi di Juba dan mengabaikan daerah pinggiran. Hal ini membuat masyarakat pedesaan hampir seluruhnya tanpa akses dan menyebabkan penajaman kesenjangan pembangunan antara pedesaan dengan perkotaan.¹⁴

Selain itu, kekuasaan terkonsentrasi di eksekutif dan presiden, dengan legislatif dan yudikatif berada di bawah (secara vertical).¹⁵ Kondisi tersebut diperparah oleh ruang politik yang terbatas untuk kelompok oposisi, adanya korupsi yang terus meluas dikalangan elite dan juga perebutan sumber daya minyak.¹⁶ Melalui fenomena-fenomena diatas, dapat dilihat bahwa dalam proses transisi demokrasi, Sudan Selatan mengalami permasalahan yang kompleks. Kompleksitas tersebut menyebabkan terhambatnya cita-cita demokrasi.

Beberapa negara berhasil dalam proses transisi demokrasi, namun ada pula beberapa diantaranya yang harus melalui proses transisi

¹³ Karena prioritas utama pemerintah adalah mengatasi penyebab utama konflik dan menstabilkan ekonomi, sehingga pengeluaran untuk sektor utama termasuk kesehatan, pendidikan air dan sanitasi serta pertanian dan pembangunan pedesaan dibatasi. Oleh karenanya, ketidakamanan dan kurangnya layanan dasar belum terselesaikan. (Sumber: worldbank.org.).

¹⁴ Leben Moro, dkk. "*Statebuilding and legitimacy: Experiences of South Sudan*" dalam Feinstein International Center, Januari 2017, 19.

¹⁵ Artinya, kekuasaan presiden lebih dominan dibandingkan dengan legislatif dan yudikatif. (Lihat: Abraham A. Awolich, "*Fixing Governance is key to Stability in South Sudan*").

¹⁶ Guri Storaas, "Participation on Paper but nt in Practice? The South Sudan Constitutional Review Process", *International Development Research Centre* dalam Berghof Foundation Operations GmbH 2015, 4.

demokrasi dengan penuh gejolak bahkan berada dalam keruntuhan nasional.¹⁷ Keberhasilan demokratisasi terlihat di beberapa negara Eropa Timur, Seperti Ceko dan Hongaria, karena mereka merupakan masyarakat yang homogen.¹⁸ Di wilayah Timur Tengah, Tunisia mejadi satu-satunya negara yang berhasil memasuki era demokrasi pasca tumbangya rezim diktator Presiden Ben Ali melalui peristiwa Arab Spring 2011.¹⁹

Di Sudan Selatan, proses transisi demokrasi berlangsung dengan penuh gejolak politik yang terdiri dari konflik elit, konflik etnis, agama, konflik internasional hingga munculnya gerakan pemberontak. Jika dilihat secara demografis, Sudan Selatan dihuni oleh mayoritas agama Kristen dan bangsa Afrika. Namun, terlepas dari status mayoritas Kristen, baru baru ini terdapat sebuah laporan bahwa terjadi serangan terhadap anggota gereja terkemuka. Elite politik Sudan Selatan juga mengenyampingkan gereja sebagai kekuatan politik. Padahal, pendeta memiliki peranan penting dalam perjuangan kebebasan Sudan Selatan melawan Sudan.²⁰ Disisi lain, konflik di Sudan Selatan terjadi akibat elite politik tidak mampu mengonsolidasikan demokrasi dan hanya mengedepankan kepentingan kelompok etnis masing-masing elite sehingga melahirkan perang saudara. Kelompok elite yang lebih menonjolkan kepentingan etnis tersebut disebut dengan politik identitas.

¹⁷ Kris Nugroho..., 25.

¹⁸ Zeffry Alkatiri..., 40.

¹⁹ Humhrey Wangke, "Masyarakat Sipil dan Transisi Demokrasi di Timur Tengah", *Info Singkat Hubungan Internasional.*, Vol. VI, No. 03, (Februari 2014), 6.

²⁰ Christopher Tounsel., "Ten Years after South Sudan's Independence, A Look at the Church's Role Amid-clerical Violence", dalam <https://thewire.in/world/south-sudan-independence-church-islam-anti-clerical-violence> diakses 12 Juni 2022

Melihat perkembangan situasi politik terakhir, terdapat kecenderungan bahwa transisi menuju demokrasi secara damai atau non kekerasan di Sudan Selatan masih sulit untuk diterapkan. Sebaliknya, pergolakan di Sudan Selatan tetap tinggi, terutama di wilayah-wilayah perbatasan seperti di wilayah Kordofan Selatan dan Nil Biru.²¹ Pergolakan juga terjadi di perbatasan Abyei dan Heglig yang memiliki kekayaan minyak melimpah.²² Pergolakan lainnya terjadi sejak sebulan setelah kemerdekaan di Juba, Jonglei,²³ Lowuareng, Lasu dan Lata.²⁴

Berangkat dari fenomena diatas, peneliti melihat bahwa cita-cita demokrasi Sudan Selatan yang berdasarkan pada kesetaraan dan persamaan bukan mengarah pada perdamaian dan kesejahteraan, namun justru mengalami kekacauan dalam struktur politik, krisis ekonomi dan ketidakamanan. Kesenjangan antara cita-cita demokrasi dengan apa yang terjadi di Sudan Selatan saat ini sangat layak dan menarik untuk diteliti lebih jauh lagi guna mengungkapkan apa yang menjadi faktor penyebab terhambatnya cita-cita demokrasi Sudan Selatan.

Maka dari itu, dalam penelitian ini dibahas mengenai bagaimana proses demokrasi berlangsung di Sudan Selatan. Di dalam teori demokrasi

²¹ Putri Cahyati, "Analisis Konflik Sudan dan Sudan Selatan Pasca Referendum Pemisahan Diri Sudan Selatan dari Sudan", *Journal of International Relations.*, Vol. 3, No. 4, (2017), 88.

²² Lipi. 04 Februari 2011. "Referendum Penutup Konflik Sudan", <http://www.politik.lipi.go.id/ose-fileman/kolom/kolom-1/politik-internasional/403-referendum-penutup-konflik-sudan.>, (Diakses 29 Oktober 2020).

²³ Firda Rosyana, Windy Dermawan, Akim, "Pendekatan Negosiasi Konflik dalam Resolusi Konflik di Sudan Selatan", *Jurnal ICMES.*, Vol. 3, No. 1, (Juni 2019), 62.

²⁴ News.okezone.com. 01 April 2021. "Serangan di Sudan Selatan Tewaskan Hampir 30 Orang", <https://news.okezone.com/read/2021/04/01/18/2387854/serangan-di-sudan-selatan-tewaskan-hampir-30-orang#>., (Diakses 11 April 2021).

oleh Jack Snyder dikenal istilah *mature Demokrasi* (MD), yang artinya negara yang demokrasiya sudah matang dan istilah *democratizing* (DS), negara yang sedang menuju demokrasi. Dalam penelitian ini akan melihat bagaimana arah demokratisasi Sudan Selatan, apakah sudah mencapai demokrasi yang matang atau masih dalam tahap menuju demokrasi.

Disisi lain, peneliti juga membahas mengenai politik identitas yang terjadi di Sudan Selatan selama proses demokrasi. Elaborasi terhadap permasalahan ini sebagai lanjutan dari permasalahan mengenai kompleksitas demokratisasi di Sudan Selatan. Hal ini dilakukan untuk menemukan hubungan antara proses demokrasi dengan politik identitas yang menggambarkan kompleksitas pembangunan konstitusi di Sudan Selatan.

Selain kedua permasalahan diatas, peneliti juga membahas mengenai posisi Sudan Selatan sebagai negara miskin dan terbelakang dengan sejarah pangan perang saudara serta keberagaman dan menjunjung tinggi etnis mampu menerapkan sistem demokrasi. Dalam hal ini, artinya Sudan Selatan harus mampu menerapkan prinsip bahwa semua orang memiliki hak yang sama dan setara tanpa memandang latar belakang etnis. Peneliti juga menelaah bagaimana masa depan demokrasi di Sudan Selatan serta posisi Sudan Selatan terhadap peta politik di Timur Tengah.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka untuk lebih terstruktur dan sistematisnya sebuah penelitian. Peneliti memberikan batasan-batasan dalam karya ilmiah sebagai fokus dari penelitian yang akan dielaborasi lebih jauh oleh peneliti. Pembatasan dalam penelitian ini dilakukan agar pembahasan yang tercakup di dalam tulisan tidak meluas. Subyek utama penelitian adalah demokratisasi di Sudan Selatan, yang terkait dengan politik identitas yang memengaruhi.

Untuk lebih mempersempit lagi cakupan kajian, maka peristiwa yang dipilih adalah yang terjadi setelah perang saudara berakhir dan ditandatanganinya perjanjian damai pada tahun 2005 dan setelahnya. Sejatinya gerbang kemerdekaan kemerdekaan dan gelombang demokratisasi di Sudan Selatan telah hadir sejak beberapa dekade sebelumnya. Pertengahan abad ke-19 merupakan awal dari timbulnya gerakan separatis dan kemerdekaan Selatan atas Utara yang menggemparakan dunia Arab dan Afrika, yang mana kemunculannya tidak terlepas dari Arabisasi dan Islamisasi. Namun, tulisan ini hanya terfokus kepada berbagai kasus yang terjadi setelah Sudan Selatan mencapai kemerdekaan yang memiliki pengaruh terhadap proses demokrasi.

Sudan Selatan mulai melakukan gerakan separatis terhadap Sudan Lama di tahun 1955. Gerakan inilah yang kemudian dihubungkan dengan pemicu terjadinya demokratisasi di Sudan Selatan pada tahun 2005.

Terdapat proses panjang dari awal dimulainya separatisme, perang saudara, perdamaian, kemerdekaan hingga demokratisasi di Sudan Selatan.

Peristiwa penting selama perang saudara dengan Sudan terjadi pada tahun 1955-1972 dan 1983-2005. Peristiwa tersebut yang kemudian memengaruhi kehidupan masyarakat Selatan setelahnya. Peneliti akan menjelaskan secara garis besar mengenai kejadian-kejadian penting seputar sejarah gerakan separatis Selatan terhadap pemerintah Sudan untuk mencapai kemerdekaan dan demokrasi di Sudan Selatan. Uraian mengenai peristiwa tersebut diperlukan untuk menemukan transformasi sosial dan politik serta pengaruhnya terhadap demokratisasi.

Selama pertengahan abad ke 19 banyak berbagai peristiwa yang terjadi terkait perubahan tatanan politik dan sosial masyarakat Sudan Selatan. Untuk menghindari kerancuan topik “Politik Identitas dan Arah Demokratisasi di Sudan Selatan” maka kajian ini lebih memfokuskan kepada peristiwa-peristiwa yang memang memiliki *historical course* yang sejalan dengan proses demokrasi di Sudan Selatan. Berdasarkan kepada pembatasan yang dipaparkan diatas, penelitian ini akan menjawab permasalahan mengenai bagaimana kompleksitas antara elite politik dengan kelompok etnis di Sudan Selatan memengaruhi berjalannya proses demokrasi di Sudan Selatan dalam Perspektif Teori Demokrasi oleh Jack Snyder dan Teori Relasi Kuasa Michel Foucault. Adapun permasalahan yang diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pemicu terjadinya demokratisasi di Sudan Selatan?
2. Bagaimana hubungan demokratisasi dengan konflik yang melahirkan politik identitas di Sudan Selatan?
3. Bagaimana perkembangan demokratisasi di Sudan Selatan saat ini?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk pengembangan:

- a. Pengembangan wawasan keilmuan peneliti, serta menambah *khazanah* ilmu dibidang politik;
- b. Memberikan sumbangan keilmuan terkait dengan proses demokrasi dalam sebuah negara baru;
- c. Memberikan sumbangan pemikiran mengenai kelembagaan demokrasi pasca peralihan kekuasaan serta korelasi antara demokratisasi dengan konflik nasionalis yang melahirkan politik identitas.

Beberapa manfaat secara akademik yang diharapkan dari kajian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemahaman mengenai demokratisasi dalam sebuah negara baru serta melihat kompleksitas yang terjadi antara elite politik dengan kelompok tertentu dalam proses mencapai demokrasi.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap studi Ilmu hubungan internasional terutama studi di kawasan Timur Tengah dan Afrika (MENA) dalam menambah literatur mengenai demokratisasi sebuah negara, terutama di Sudan Selatan.

- c. Penelitian ini berguna untuk memenuhi salah satu syarat ujian pascasarjana program magister pada program studi *Interdisciplinary Islamic Studies* konsentrasi Kajian Timur Tengah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Tinjauan Pustaka

Tulisan-tulisan ilmiah yang membahas politik identitas dan arah demokratisasi di Sudan Selatan memang tidak banyak yang mengkaji. Terlebih lagi kasus-kasus yang terjadi pada masa pra-transisi. Berbagai penelitian yang telah ada seputar perang saudara Utara dengan Selatan dan seputar kemerdekaan Sudan Selatan. Namun, sejauh ini peneliti belum menemukan satu karya utuh yang mengupas persoalan kompleksitas antara elite politik dengan kelompok etnis di Sudan Selatan mempengaruhi berjalannya proses demokrasi di Sudan Selatan.

Pada penelitian ini, peneliti menelaah dari berbagai literatur yang ada seperti buku, artikel, media massa, skripsi maupun tesis. Literatur tersebut berkaitan dengan variabel bebas, variabel terikat dan korelasi antar kedua variabel tersebut guna memudahkan dan memperjelas bahwa penelitian dalam tesis ini layak untuk diteliti lebih lanjut. Disamping itu, kajian bibliografi juga dapat membantu menghindari tindakan plagiarisme.

Berdasarkan kepada penelusuran peneliti, indikator kajian bibliografi yang tercakup adalah tulisan-tulisan ilmiah yang membahas topik seputar hubungan proses demokrasi dengan politik identitas di Sudan Selatan, serta relasi antara kedua subyek dari penelitian. Kasus dari karya yang paling disoroti adalah pembatasan tahun yang tidak terlalu jauh. Berikut ini peneliti akan memaparkan beberapa temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini sebagai rujukan dalam memahami permasalahan seputar politik identitas dan arah demokrasi di Sudan Selatan.

1. Demokratisasi

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Sahide, melalui bukunya dengan judul *The Arab Spring: Tantangan dan Harapan Demokratisasi*. Dalam penelitiannya, Ahmad Sahide membahas gejala demokratisasi di wilayah Timur Tengah melalui fenomena Arab Spring yang dimulai pada awal Januari 2011 di negara Tunisia, Mesir, Libya, Yaman, Bahrain dan Suriah. Fenomena tersebut telah membuka pintu demokrasi di negara yang telah lama dipimpin dalam sistem politik yang otoriter. Tantangan dan harapan dalam proses tersebut dibahas secara rinci dalam buku ini. Salah satunya tantangan yaitu kondisi budaya dan sosial masyarakat Arab dan partisipasi politik perempuan yang rendah, para elite politik yang takut kehilangan kekuasaannya sehingga menghambat proses demokrasi, serta tantangan ekstremalnya yaitu adanya pengaruh asing yang turut menghambat proses demokrasi di Arab. Namun, peluang demokrasi di

sebagian negara dapat dilaksanakan dengan menjelaskan perkembangan proses demokrasi di negara-negara yang tengah mengalami transisi politik melalui Arab Spring.

Penelitian yang dilakukan oleh Peter Biar Ajak dengan judul penelitiannya yaitu “State Formation, Humanitarianism, and Institutional Capabilities in South Sudan”. Penelitian ini menjelaskan tentang keterlibatan sistem kemanusiaan internasional di Sudan Selatan selama periode kenegaraan pada Juli 2011 hingga periode segera sebelum pecahnya krisis Desember 2013 serta menguraikan mengenai kebutuhan dan tantangan besar yang dihadapi Sudan Selatan sejak kemerdekaan, krisis kemanusiaan dan bagaimana tanggapan aktor internasional.

2. Kekuasaan dan Kekerasan

Penelitian kelompok yang dilakukan oleh Leben Moro, Martina Santschi, dkk, dalam artikel yang berjudul “Statebuilding and Legitimacy: Experiences of South Sudan”. Dalam penelitian ini membahas mengenai antededen historis kebijakan dan praktik pemerintah Sudan Selatan selama periode interim (2005-2011). Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa pembangunan negara di Sudan Selatan sangat lemah sehingga mengarah pada lebih banyak kekerasan dan krisis kemanusiaan, pengungsian massal, terorisme dan hasil negatif lainnya. Selain itu, Sudan Selatan yang rentan secara politik, garis antara pemerintah dan negara menjadi kabur. Sumber legitimasi di Sudan Selatan berasal dari simbol

otoritas, seperti tongkat jalan, atau merujuk pada latar belakang keluarganya sebagai bagian dari keluarga utama atau keluarga pemimpin tradisional.

Dalam artikel tersebut disebutkan juga bahwa, sejak tahun 2005 para donor dan aktor internasional lainnya sebagian besar memfokuskan upaya mereka pada kegiatan teknis. Keterlibatan mereka sebagian besar bersifat ahistoris dan apolitis, dan karenanya telah mengabaikan ketegangan politik diantara para pemain kunci di Sudan Selatan. Pengabaian internasional tersebut secara tidak langsung berkontribusi pada perang saudara pada tahun 2013. Pembangunan infrastruktur pun ditinggalkan dan semua fokus internasional dialihkan ke dalam bantuan kemanusiaan yang terkena dampak perang. Bagi banyak orang, warisan pembebasan telah memudar mengingat kekerasan yang meluas, kesengsaraan kemanusiaan yang semakin dalam dan tantangan ekonomi yang semakin buruk.

3. Politik Identitas

Penelitian yang dilakukan oleh Vikramendra Kumar dalam artikel jurnal yang berjudul “Citizenship, Violence and Identity Politics” membahas hubungan kompleks antara kewarganegaraan, kekerasan dan politik identitas. Argument utama dalam penelitian ini adalah bahwa konsepsi tradisional tentang kewarganegaraan telah terkikis oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan negara neo-liberal, tetapi juga, yang terpenting

yaitu munculnya politik identitas, dengan klaim terhadap negara tidak lagi dibuat atas dasar kelas, tetapi atas dasar seksualitas, agama dan gender.

Melalui penelitiannya, dijelaskan bahwa kewarganegaraan umumnya dipandang sebagai hak individu atas perlindungan kehidupan, kebebasan, properti dan kesejahteraan. Disebutkan juga bahwa kewarganegaraan dapat di definisikan sebagai masalah status dan kualitas. Maksudnya adalah status kewarganegaraan terdiri dari hak dan kewajiban setiap warga negara, sedangkan kualitas terdiri dari partisipasi dan pengelolaan politik. Partisipasi politik ini sangat penting untuk mengembangkan rasa keanggotaan dalam masyarakat, dan dengan demikian maka akan membentuk identitas politik bersama.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Madut Kon dalam *Journal of Global Economics* (2015) yang berjudul “Institutional Development, Governancen, and Ethnic Politics in South Sudan” membahas mengenai bagaimana kompleksitas etnis dan sosial budaya dalam pemerintahan, sistem politik, dan lembaga birokrasi di Sudan Selatan. Hasilnya menunjukkan bahwa Sudan Selatan terus menghadapi berbagai tantangan sosial-budaya, politik, dan ekonomi dalam transisinya dari sistem etno-sentris ke pemerintahan demokratis. Dalam jurnal ini memberikan pandangannya bahwa afiliasi etnis dan suku merupakan penyebab mendasar dari konflik antar etnis dan politik yang sedang berlangsung di Sudan Selatan. Bisa dilihat dari bentrokan etnis besar yang

dilaporkan di Sudan Selatan sejak kemerdekaannya dipengaruhi oleh suku, budaya kelompok, dan gaya hidup mereka.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa Sudan Selatan adalah negara dengan lebih dari enam puluh suku tetapi hanya dua etnis, Dinka dan Nuer, yang mendominasi pemerintahan sampai pecahnya perang saudara tanggal 15 Desember dan pembantaian selanjutnya atas Nuer di Juba. Akibatnya, praktik perekrutan sekarang dilakukan berdasarkan kesetiaan etnis dan suku. Sejak kemerdekaannya, partai yang berkuasa, yaitu SPLM dan kepemimpinannya tergelincir ke dalam pendekatan etno-sentris pemerintahan yang sangat bergantung pada nepotisme dan penunjukan politik atas keterampilan dan kualifikasi calon potensial. Praktik tersebut telah menyebabkan lemahnya sistem pemerintahan, partai politik, dan fungsi birokrasi di Sudan Selatan.

Berdasarkan tinjauan-tinjauan bibliografi diatas, peneliti belum menemukan satu penelitian utuh yang membahas “Politik Identitas dan Arah Demokratisasi di Sudan Selatan”. Masing-masing tulisan mayoritas membahas tantangan Sudan Selatan dalam membangun sebuah negara baru secara keseluruhan. Kajian ini diperlukan sebagai penekanan terhadap arah demokratisasi di Sudan Selatan dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi, utamanya masalah politik identitas.

E. Kerangka Teoritis

Penelitian “Politik Identitas dan Arah Demokratisasi di Sudan Selatan” adalah sebuah kajian yang dimaksudkan untuk meneliti secara kritis berbagai peristiwa yang terjadi sejak pertengahan abad ke 19. Peristiwa tersebut merupakan tonggak awal terjadinya demokratisasi di Sudan Selatan. Penelitian ini merupakan sebuah telaah yang mencoba untuk merekonstruksikan secara deskriptif pola-pola masyarakat, peristiwa sosial dan politik serta gagasan yang memengaruhi proses demokrasi di Sudan Selatan. Oleh karenanya teori yang dipilih dalam penelitian ini adalah “Teori Demokrasi” oleh Jack Snyder, untuk menjawab peristiwa demokratisasi di Sudan Selatan. Kemudian teori “Teori Relasi Kuasa” oleh Michel Foucault, melalui pendekatan genealogi, membantu menjawab proses demokrasi ditengah gejolak politik di Sudan Selatan.

Melalui dua teori tersebut peneliti dituntut untuk dapat menemukan jawaban atas kompleksitas pada tahap awal proses demokratisasi. Menurut Snyder, pergolakan dalam demokratisasi diakibatkan oleh propaganda antara elite politik dan persaingan antar kelompok masyarakat. Kemudian Foucault melengkapi analisis fenomena tersebut melalui wacana yang dikemas oleh elite untuk kepentingannya sendiri guna memperebutkan dan mempertahankan kekuasaannya dalam pemerintahan. Pada akhirnya, peristiwa tersebut menyeret Sudan Selatan ke dalam pengulangan sejarah dimana perang saudara berbasis etnis dan kesukuan mengakar di wilayah Sudan Selatan.

Yang pertama adalah teori demokratisasi oleh Jack Snyder. Demokratisasi adalah proses perubahan rezim apa pun ke arah demokrasi, misalnya dari otokrasi ke demokrasi, dari rezim campuran ke demokrasi, atau dari otokrasi ke rezim campuran.²⁵ Definisi demokrasi itu sendiri adalah mempromosikan atau mengekspresikan kebaikan bersama dari publik apapun yang menjalankan pemerintahan sendiri. Schumpeter berpendapat bahwa demokrasi sebagai pengaturan kelembagaan untuk mencapai keputusan politik dimana individu memperoleh kekuatan untuk memutuskan melalui perjuangan kompetitif untuk suara rakyat.²⁶ Snyder membedakan demokratisasi menjadi negara-negara yang demokrasiya sudah matang (*mature demcaracies/MD*) dan negara yang sedang menuju demokrasi (*democratizing/DS*).

Dalam tahap demokrasi yang matang, kebijakan pemerintah disusun oleh elite politik yang dipilih melalui pemilu yang dilakukan secara langsung, umum, rahasia, jujur dan adil secara berkala. Selain itu, ruang publik, kebebasan berorganisasi untuk bersaing dalam pemilu, dan kebebasan pers tidak dibatasi. Negara yang sedang menuju demokrasi menurut Snyder disebut sebagai negara yang baru saja memenuhi satu atau lebih dari syarat-syarat demokratisasi²⁷ meskipun negara tersebut masih

²⁵ Edward D. Mansfield dan Jack Snyder, "Democartization and War", *Foreign Affairs.*, Vol. 74, No. 3, (Mei-Juni 1995), 81.

²⁶ Frank Cunningham, *Theoris of Democracy: A critical Introduction*, (Kanada: Taylor and Francis e-Library, 2002), 10.

²⁷ Kebebasan membentuk dan bergabung dalam organisasi; kebebasan berkspresi; hak memilih dan dipilih; kesempatan yang relative terbuka untuk menduduki jabatan-jabatan public; hak bagi pemimpin politik untuk berkompetisi dalam mendapatkan dukungan antar memberikan dukungan; alternative sumber-sumber informasi; pemilu yang bebas dan adil; pelembagaan

mempertahankan ciri-ciri penting yang tidak demokratis yang dianut sebelumnya.²⁸ Snyder juga menuliskan negara yang sudah matang demokrasinya jika sudah melewati dua kali pergantian kekuasaan melalui pemilu yang langsung, umum, jujur dan adil.²⁹

Snyder berkata bahwa negara-negara yang berhasil meraih demokrasi yang matang tidak terjadi hanya dalam semalam. Mereka biasanya melalui transisi yang sulit, dimana politik massa bercampur dengan politik elite otoriter dengan cara yang bergejolak. Bukti statistik dua abad terakhir menunjukkan bahwa dalam fase transisi demokratisasi, negara-negara dengan demokratisasi menjadi lebih agresif dan rawan perang. Misalnya, Rusia yang mengalami lebih dari dua kali perang setelah demokratisasi dibandingkan dengan negara-negara yang tetap otokrasi.³⁰

Dalam pandangan Snyder, demokratisasi tidak terlepas dari perang, keduanya memiliki korelasi yang saling terkait. Perang biasanya terjadi di negara-negara yang berada pada tahap awal demokratisasi. Langkah-langkah awal transisi demokrasi dapat meningkatkan pergolakan antar kelompok masyarakat, khususnya di negara-negara baru. Perang selama demokratisasi disebabkan oleh aspek yang tercantum dalam demokratisasi

pembuatan kebijakan pemerintah yang merujuk atau tergantung suara rakyat melalui pengumuman suara ataupun cara-cara sejenis. (Sumber: Robert A. Dahl).

²⁸ Ahmad Sahide, *The Arab Spring: Tantangan dan Harapan Demokratisasi*, (Jakarta: PT. Media Kompas Nusantara: Jakarta, 2019), 29.

²⁹ *Ibid.*, 30.

³⁰ Edward D. Mansfield dan Jack Snyder, "Democratization and War", *Foreign Affairs.*, Vol. 74, No. 3, (Mei-Juni 1995), 97-80.

itu sendiri, yaitu persaingan antar partisipasi kelompok dan propaganda elite, khususnya di eksekutif. Rata-rata peningkatan atas keterbukaan proses seleksi untuk kepala eksekutif memungkinkan untuk terjadinya perang.³¹ Dalam hal ini, demokratisasi hanya mencerminkan cita-cita kelompok rakyat tertentu yang sudah lama terbentuk dan tidak cocok dengan cita-cita kelompok masyarakat lain.³²

Disamping itu, nasionalisme kerap menjadi salah satu pemicu perang dalam demokratisasi, utamanya di negara-negara bekas komunis. Kebangkitan sentimen nasionalis sering muncul kembali seiring dengan meningkatnya demokrasi.³³ Dalam banyak kasus, nasionalisme dijadikan kekuatan bagi para kelompok elite militer untuk tampil populis dalam masyarakat yang demokratis sambil menghalangi kemajuan menuju demokrasi penuh.³⁴

Keterkaitan antara nasionalisme, demokratisasi, dan perang bahkan lebih jelas di negara-negara baru. Misalnya, di "Wilhelmine Serbia," para elite politik dan militer dari rezim lama, menghadapi tekanan tak terhindarkan dalam proses demokrasi. Elite Serbia berhasil menciptakan basis legitimasi baru melalui propaganda nasionalis dan aksi militer, dan mereka baru-baru ini memenangkan pemilihan yang dimanipulasi.³⁵ Singkatnya, negara-negara yang demokratisasi rawan perang bukan karena

³¹ Edward D. Mansfield dan Jack Snyder..., 82.

³² Ahmad Sahdie..., 31.

³³ Edward D. Mansfield dan Jack Snyder..., 83.

³⁴ *Ibid.*, 86.

³⁵ *Ibid.*, 87.

perang populer di kalangan masyarakat umum, tetapi karena tekanan domestik menciptakan insentif bagi para elite untuk menghidupkan sentimen nasionalis.³⁶

Demokratisasi biasanya menciptakan sindrom otoritas pusat yang lemah, koalisi domestik yang tidak stabil, dan politik massa yang kuat. Hal ini membawa kelompok dan kelas sosial baru panggung politik. Para pemimpin politik, yang tidak menemukan cara untuk mendamaikan kepentingan-kepentingan yang bertentangan, menggunakan cara picik yang sembrono untuk mempertahankan koalisi pemerintahan mereka. Elite perlu mendapatkan sekutu massal untuk mempertahankan posisi mereka yang melemah. Baik elite baru yang ambisius maupun kelompok penguasa lama yang diperangi sering menggunakan seruan nasionalisme untuk tetap mengangkangi koalisi politik mereka yang tidak terkendali.³⁷

Dalam bukunya, Snyder mengungkapkan faktor penyebab perang pada saat awal demokratisasi. Faktor tersebut diantaranya kebuntuan politik dan koalisi imperialis, minat yang tidak fleksibel dan cakrawala waktu singkat, para elite bersaing untuk mendapatkan dukungan rakyat, melemahnya otoritas pusat dan strategi prestise.³⁸ Sudan Selatan, jika dilihat dari klasifikasi demokrasi menurut Jack Snyder, termasuk kedalam negara yang sedang menuju demokrasi. Dalam prosesnya, meskipun telah

³⁶ *Ibid.*, 88.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*, 89-93.

melewati 1 dekade kemerdekaan, demokratisasi di Sudan Selatan mengalami penuh pegolakan konflik nasionalis.

Sejarah Sudan Selatan menuju demokratisasi dibagi kedalam 3 fase yang terbagi ke dalam tahapan berikut:

- a. Tahap I: 6 tahun masa peralihan (9 Juli 2005-8 juli 2011).
- b. Tahap II: Waktu singkat setelah kemerdekaan (9 Juli 2011- 14 Desember 2013).
- c. Tahap III: Periode krisis (15 Desember 2013-2018, bahkan hingga saat ini).

Pada masa peralihan terdapat pemberontakan lokal yang tidak puas terhadap hasil pemilu. Para pemberontak mengklaim bahwa hasil pemilu penuh dengan manipulasi. Kemudian pada tahap transisi banyak masyarakat Sudan Selatan yang merasa kecewa dengan arah negaranya tersebut, dimana terjadi korupsi di pemerintahan.³⁹ Kekerasan komunal yang meluas, ketegangan dengan Sudan yang kembali meningkat berdampak secara langsung terhadap proses pembangunan negara Sudan Selatan.

³⁹ Pada tahun 2005-2006, laporan audit yang disampaikan oleh Auditor Jenderal kepada Majelis Nasional (NA) mengungkapkan penyalahgunaan sumber daya negara yang merajalela. Alih-alih mendorong pembangunan, miliaran petrodolar atau sekitar 98% dari PDB Sudan Selatan hilang karena korupsi yang dilakukan oleh elite politik. Oleh karena itu, negara tidak dapat memberikan layanan dasar dan keamanan yang memadai bagi penduduknya. Selain itu, pembagian distribusi sumber daya yang tidak adil di tingkat pusat dan negara bagian. Dalam hal alokasi sumber daya, sebagian besar dialokasikan untuk keamanan dan hanya sumber daya terbatas untuk pemberian layanan. Pada tahun 2012, misalnya, 7% anggaran dibelanjakan untuk pendidikan, 7% untuk kesehatan, 9% untuk infrastruktur, sementara 13% untuk *'the rule of law'* dan 28% untuk keamanan. (Sumber: Leben Moro, 20).

Periode krisis ditandai dengan kehancuran total dari persatuan nasional mengenai cita-cita demokrasi. Perang saudara kembali terjadi di Sudan Selatan akibat persaingan politik antar elit. Propaganda naik ke permukaan mengakibatkan meningkatnya kekerasan, ketidakamanan dan pengungsian besar-besaran. Ruang politik menjadi terbatas serta kebebasan berekspresi menyusut secara signifikan.⁴⁰

Krisis di Sudan Selatan berakar pada lemahnya institusi dan kepemimpinan, perebutan kekuasaan dan rumitnya perpaduan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat. Adanya impunitas, sistem hukum yang lemah serta CPA yang tidak terimplementasi dengan baik juga berkontribusi pada krisis yang terjadi di Sudan Selatan.

Pemerintah tidak melakukan tugasnya dengan baik meskipun memiliki banyak dukungan dana dari internasional serta memperoleh keuntungan dari hasil produksi minyak pada awal kemerdekaan. Pemerintah tidak memulai proyek pembangunan besar apapun setelah merdeka. Tidak ada sumber air bersih di semua kota besar dan kecil, pusat pemerintahan masih didukung oleh *generator diesel* milik pribadi. Hanya terdapat satu jalan aspal yang menghubungkan kota Juba dengan Nimule yang dibangun oleh AS, dan saat ini sudah mulai rusak seiring berjalannya waktu.⁴¹

⁴⁰ Harry Verhoeven, "Understanding the Implications of South Sudan's Independence", *e-International Relations*, 10.

⁴¹ Worldbank. "South Sudan", dalam <https://www.worldbank.org/en/country/southsudan>, (diakses 07 Agustus 2021).

Untuk memahami sikap pemerintah yang bersikap demikian, Peneliti menggunakan pendekatan genealogi dalam Teori Relasi Kuasa oleh Michel Foucault untuk membantu memahami berbagai peristiwa dan persoalan tersebut. Michel Foucault merupakan pemikir terkemuka asal Prancis dibidang filsafat, antropologi, kebudayaan, sosial, politik maupun dalam bidang kesenian pada abad ke-20. Salah satu kontribusi besar Foucault dalam bidang filsafat dan politik yaitu konsepnya mengenai kekuasaan.⁴²

Kekuasaan dalam pandangan Foucault tidak dipahami secara negatif seperti dalam perspektif Marxian, melainkan produktif dan reproduktif.⁴³ Kekuasaan perspektif Marxian bersifat monolitik, hirarkies, sebagai sesuatu yang dimiliki individu atau kelompok untuk mengontrol yang lain. Foucault melihat praktik kekuasaan semacam itu mengabaikan fungsi kekuasaan yang nyata pada masyarakat modern. Ia meyakini bahwa gagasan tersebut tidak cukup untuk memahami praktik penundukan yang tak kasat mata. Foucault mengartikan kekuasaan sebagai suatu sistem dominasi global yang dilakukan oleh suatu unsur atau suatu kelompok atas yang lain, serta disalurkan secara berturut-berturut, sehingga dampaknya melanda masyarakat seutuhnya.⁴⁴

⁴² Arif Syarifuddin, "Pengaruh Kekuasaan Atas Pengetahuan: Memahami Teori Relasi Kuasa Michel Foucault", 141.

⁴³ Umar Kamahi, "Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik", dalam *Jurnal Al-Khitabah.*, Vol. III, No. 1, (Juni 2017), 117.

⁴⁴ Langgeng Prima Anggradinata, "Konsep Kegilaan dan Kekuasaan Michel Foucault Dalam Cerpen "Catatan Harian Orang Gila" Karya Lu Xun", *Jurnal Wahana.*, Vol. 1 No. 13, (2017), 6.

Bagi Foucault, kekuasaan merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut situasi strategis dalam masyarakat. Fokus Foucault tentang kekuasaan, berpusat pada bagaimana kekuasaan beroperasi atau dengan cara apa kekuasaan itu dioperasikan.⁴⁵ Menurutnya, kekuasaan harus dipahami sebagai sesuatu yang melanggengkan relasi kekuatan, yang membentuk rantai atau sistem dari relasi itu, atau justru mengisolasi mereka dari yang lain dari suatu kekuatan. Oleh karena itu, kekuasaan merupakan strategi dimana relasi kekuatan merupakan efeknya.⁴⁶

Kuasa yang dimaksud Foucault adalah kuasa dalam arti strategi dan relasi antar manusia. Melalui metode genealogi, Foucault banyak berbicara mengenai relasi-relasi antar manusia dan bagaimana kuasa itu dipraktikkan dalam kebudayaan dan komunikasi antar manusia.⁴⁷ Genealogi merupakan metode penelusuran sejarah yang digunakan oleh Foucault untuk mengetahui asal muasal subjek dan bagaimana mekanisme kekuasaan yang dijalankan untuk itu. Dengan kata lain, mengkaji kebudayaan tidak lain sebenarnya merupakan tugas untuk melakukan genealogisasi subjek. Artinya, yakni menggali dan menganalisa subjek macam apa yang terbentuk, bagaimana sejarah terbentuknya, serta apa mekanisme kekuasaan yang dijalankan, dalam situasi tertentu.⁴⁸

⁴⁵ Umar Kamahi, 118-119.

⁴⁶ *Ibid.*, 120.

⁴⁷ Konrad Kebung, "Membaca 'Kuasa' Michel Foucault Dalam Konteks 'Kekuasaan' di Indonesia", *Jurnal Melitas.*, Vol. 33 No. 1, (2017), 38.

⁴⁸ Abdil Mughis Mudhoffir, "Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik", *Jurnal Sosiologi MASYARAKAT.*, Vol. 18, No, (Januari 2013), 92.

Melalui analisis genealogi, Foucault memulai penelitiannya terkait dengan karakteristik relasi kekuasaan (*power relation*). Penelitian tersebut berangkat dari pertanyaan “bagaimana beroperasinya kekuasaan” dan bagaimana melihat hubungan pengetahuan dan kekuasaan. Dalam pandangannya, tidak ada pola umum hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan, karena dalam setiap zaman, hubungan pengetahuan dan kekuasaan memiliki karakteristik tertentu. Hal inilah yang menggugah Foucault menggunakan metode genealogi sebagai perangkat analisisnya, yakni untuk mengetahui teknologi dan strategi kekuasaan beroperasi melalui pengetahuan.⁴⁹

Melalui *genealogy of power*, Foucault memperluas penyelidikannya pada teknologi kekuasaan. Analisis genealogi memunculkan tubuh yang dipandang sebagai objek pengetahuan dan target beroperasinya kekuasaan. Konsepsi tentang tubuh dilekatkan pada ranah politik, tertanam dalam relasi kekuasaan yang membuatnya menjadi patuh dan produktif serta berguna secara politik-ekonomi.⁵⁰

Konsep yang lahir dari sebagai hasil analisa genealogi kekuasaan Foucault adalah konsep *disciplinary power*, yang digunakan untuk suatu bentuk kekuasaan dan wujud teknologi atau mekanisme beroperasinya kekuasaan itu. Pada konteks negara, *disciplinary power* berlangsung dalam institusi-institusi tertutup sebagai mekanisme pengendalian individu agar

⁴⁹ Abdil Mughis Mudhoffir, 83.

⁵⁰ *Ibid.*, 85.

dapat memberikan kegunaan bagi kepentingan negara atau pemerintah. Model kekuasaan ini sudah terjadi dalam masyarakat Eropa sekitar abad 18-an.⁵¹ Namun, dalam hal ini negara tidak hanya menjalankan model kekuasaan *disciplinary power*, tetapi juga sebagaimana konsepsi Weber tentang kekuasaan, negara menjalankan kekuasaan menggunakan model *sovereign power*, yang melandaskan legitimasi operasinya pada keabsahan hukum dan kewenangan atau hak negara dalam mengatur warganya dan sumber dayanya.⁵²

Menurut Foucault, kekuasaan memiliki dua dimensi, yaitu dimensi makro dan dimensi mikro. Pada dimensi makro, kekuasaan tidak memiliki institusi serta menyebar dalam bentuk sistem disiplin.⁵³ Dalam hal ini, Foucault memberi contoh stigma antara normal dan sakit, benar atau salah, baik dan dosa merupakan bentuk lain dari praktek kekuasaan.⁵⁴ Pada dimensi mikro atau praksis, kekuasaan dijamin oleh lembaga, institusi, kelompok yang juga bertindak sebagai pemilik otoritas untuk menjamin kepatuhan.⁵⁵ Misal kekuasaan yang ada dalam suatu negara atau pemerintahan. Foucault mengenalkan istilah *governmentality* mengenai kekuasaan dalam konteks negara.

Foucault memandang kekuasaan telah bergeser dari bentuk *sovereign power* menjadi *governmentality*. *Governmentality* adalah

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*, 85-86.

⁵³ Langgeng Prima Anggradinata., 6.

⁵⁴ Iswandi Syahputra, "Post Media Literacy; Menyaksikan Kuasa Media Bersama Michel Foucault", *Jurnal ASPIKOM.*, Vol 1 No. 1, (Juli 2010), 6.

⁵⁵ Langgeng Prima Anggradinata, 6.

rasionalisasi bagaimana negara menjalankan kekuasaannya dalam mengatur masyarakat agar beroperasinya kekuasaan itu dapat diakui atau *legitimate* untuk menghindari anti-kekuasaan.⁵⁶ *Governmentality* merupakan model kekuasaan *disciplinary power* pada level negara yang membicarakan mengenai isu-isu tentang keamanan dan teritorial suatu negara dalam usaha mengontrol dan mengendalikan sumber daya dan masyarakat untuk kepentingan negara.⁵⁷

Governmentality ini disebut juga sebagai *conduct of conduct*. Artinya, negara memiliki kuasa untuk mengatur tindakan atau perilaku masyarakat dengan cara menginternalisasikan penundukan agar menjadi populasi yang patuh. Sebagai bentuk rasionalisasi beroperasinya kekuasaan, *governmentality* tidak lain juga dipandang sebagai suatu cara yang *legitimate* dan benar dalam mengatur sesuatu, yakni populasi dan sumber daya (*the right manner of disposition of things*).⁵⁸

Relasi Kuasa dengan Pengetahuan

Kuasa dalam perspektif Foucault berfungsi memproduksi pengetahuan. Foucault juga memposisikan pengetahuan sebagai bentuk dari kekuasaan. Dalam gagasannya, ia ingin menguraikan bagaimana manusia meregulasi diri, mengontrol diri dibawah kendali kekuasaan yang di representasikan oleh pengetahuan yang diamini kebenarannya.

⁵⁶ Umar Kamahi., 126.

⁵⁷ *Ibid.*, 124.

⁵⁸ Abdil Mughis Mudhoffir..., 86.

Pengetahuan dan kekuasaan mempunyai hubungan timbal balik dimana kekuasaan terus menerus akan menciptakan etnisitas pengetahuan, dan sebaliknya.⁵⁹

Foucault memiliki pandangan bahwa pengetahuan hanyalah apa yang dikumpulkan dan diputuskan oleh sekelompok orang melalui konvensi sosial budaya atau lewat kesepakatan-kesepakatan ilmiah bersama.⁶⁰ Singkatnya pengetahuan dibentuk oleh kekuasaan dan kekuasaan menghasilkan pengetahuan. Menurut Foucault, kekuasaan dan pengetahuan bekerja melalui bahasa. Karena melewati bahasa akan tercipta suatu wacana yang mana kekuatan wacana melalui bahasa merupakan mesin pembentuk makna. Foucault memberikan gagasan bahwa wacana memiliki kemampuan untuk menciptakan pengetahuan manusia. Selain itu, melalui wacana yang dibangun tersebut akan menjadi mayoritas kesepakatan bersama melalui proses normalisasi.⁶¹

Dalam pandangan Foucault, pengetahuan merupakan reduksi dari wacana yang terstruktur. Ilmu pengetahuan dan wacana menjamin terproduksinya kekuasaan. Dengan kata lain, pengetahuan memproduksi nilai kebenaran dan mendorong terciptanya kekuasaan. Contoh sederhananya yaitu dapat dilihat bagaimana wacana pemerintahan demokratis digunakan oleh para elite untuk mendapatkan legitimasi masyarakat di sebagian wilayah Timur Tengah yang mengalami peristiwa

⁵⁹ Arief Syarifuddin..., 150.

⁶⁰ Iswandi Syahputra..., 4.

⁶¹ *Ibid.*, 7.

gejolak politik yang disebut dengan *Arab Spring* hingga pada akhirnya para elite tersebut meraih kekuasaan melalui revolusi.

Sama halnya dengan peristiwa *Arab Spring*, dalam proses kemerdekaan Sudan Selatan, wacana memegang peranan penting dalam pembentukan kekuasaan di Sudan Selatan, wacana demokrasi dibentuk hingga para elite yang berhasil mendapatkan kepercayaan masyarakat Sudan Selatan saat ini tengah berada dalam puncak kekuasaan. Secara implisit, Foucault mengatakan bahwa wacana merupakan bentuk dari kekuasaan yang dapat berwujud sebagai praktik-praktik yang mengorganisasikan dan terorganisasikan serta dapat mengubah konstelasi sosial dan yang menghasilkan. Selain itu juga wacana memiliki otonomi dan klaim atas kebenaran dan kontekstualisasi sebuah pengetahuan.⁶²

Menurut Foucault, pengetahuan atau wacana beroperasi secara strategis berdasarkan kepentingan tertentu dan wacana juga secara sosial disebarkan ke tengah masyarakat sekaligus membawa keberagaman ideologi, yang pada akhirnya bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat yang menjadi objek dari proses penyebaran wacana tersebut.⁶³ Sejalan dengan pemikiran Foucault tentang relasi kuasa, peneliti melihat bagaimana pengetahuan yang di representasikan ke dalam sebuah wacana memiliki relasi terhadap kekuasaan.

⁶² Umar Kamahi..., 121.

⁶³ Aminah Bhasoan dan Amir Faisal Kotarumalos, "Praktek Relasi Wacana dan Kuasa Foucaultian dalam Realis Multi Porfesi di Indonesia", *Jurnal Populis.*, Vol. 8 No. 1, (Maret 2014), 18.

Di Sudan Selatan, dalam proses mencapai kemerdekaannya, para elite menggunakan wacana demokrasi sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan terhadap masyarakat dan menyebarkan wacana tersebut untuk mencapai tujuan kemerdekaan. Melalui wacana demokrasi pula, para elite mendapatkan legitimasinya. Wacana demokrasi digunakan oleh para elite untuk membuat konsepsi umum bagaimana Sudan Selatan yang baru itu seharusnya. Disini dapat dilihat bahwa wacana terselubungnya yaitu bahwa selain demokrasi maka tidak akan adanya kebebasan, persatuan dan perdamaian. Ada ideologi yang dibawa oleh penyebaran wacana tersebut yang berperan secara strategis untuk menyuntikkan ideologi liberalisme pada masyarakat dan mungkin mengubah sebagian besar pola pikir masyarakat. Opini publik yang sesuai dengan ideologi tersebut (kebebasan, persatuan dan perdamaian) akan menguntungkan pihak para elite yang menggunakan wacana tersebut untuk mencapai tujuannya (kekuasaan).

Disisi lain, wacana demokrasi akan membangun sebuah sentiment etnisitas yang mendalam, melalui wacana demokrasi yang kurang memunculkan rasa keadilan ini akan membangun ketersinggungan luar biasa dari etnis Sudan Selatan karena Sudan Selatan memiliki rasa kesukuan yang sangat tinggi. Disisi lain juga wacana pengetahuan dalam prakteknya seringkali digunakan untuk melanggengkan kekuasaan. Menurut Foucault, pengetahuan tidak bersifat netral, akan tetapi pengetahuan bisa bersifat politis. Dalam konteks ini, wacana dapat

digunakan untuk mengatur, mengarahkan dan mengkondisikan sebuah negara sesuai dengan tujuan tertentu.⁶⁴

Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas bahwa para elite menggunakan wacana untuk naik ke tampuk kekuasaan dan memberikan gambaran cita-cita dari masyarakat melalui wacana demokrasi. Wacana demokrasi yang digunakan oleh para elite tersebut pada dasarnya hanyalah demokrasi versi mereka sendiri, demokrasi yang tidak memberikan kebebasan dan ruang untuk berspekulasi dan penuh dengan doktrin. Para elite mendulang simpati dan dukungan mayoritas masyarakat Sudan Selatan hanya pada awal proses kemerdekaan saja.

Melihat fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa antara wacana (diskursus) dengan kekuasaan memiliki hubungan yang sistematis. Artinya bahwa kekuasaan akan bertahan jika telah berhasil menguasai opini publik atau sisi ideologis masyarakat sebagai objek yang dikuasai, untuk itu penggunaan wacana diperlukan. Penggunaan opini publik berhasil dilaksanakan oleh para elite di Sudan Selatan dengan menyebarkan dan memantapkan wacana demokrasi.

⁶⁴ Joko Priyanto, "Wacana, Kuasa dan Agama dalam Kontestasi Pilgub Jakarta Tinjauan Relasi Kuasa dan Pengetahuan Foucault", Jurnal *Thaqafiyat.*, Vol. 18 No. 2, (Desember 2017), 192.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis sistem politik model *post-behavioral*. Melalui pendekatan tersebut, peneliti dituntut untuk berusaha memahami sistem politik atau pemerintahan tertentu yang terdapat di dalam negara sehingga memperoleh sebuah jawaban dan makna yang terkandung dalam sebuah realitas politik.

Menurut David Easton, setidaknya terdapat tiga hal mendasar yang harus diperhatikan dalam menganalisa sistem politik. *Pertama*, sistem ditandai dengan adanya saling ketergantungan antar kelompok yang berada di dalamnya, hal ini menunjukkan adanya koherensi. *Kedua*, sistem mengharuskan memiliki sifat netral, bebas dari adanya pengaruh ideologi. *Ketiga*, sistem mengarahkan pada dua hal, *co-variance* dan ketergantungan antar kelompok yang membangun sistem. Jika terjadi perubahan pada satu kelompok maka akan mempengaruhi unit yang dalam sebuah sistem.⁶⁵

Berdasarkan dari tiga hal diatas, peneliti akan mengkaji serta menganalisis sistem politik mengenai proses demokrasi di Sudan Selatan. peneliti juga akan menyajikan realitas instabilitas pemerintahan yang mengakibatkan gejolak politik di Sudan Selatan sebagai objek penelitian

⁶⁵ Toto Pribadi dan Ali Muhyidin, S. IP., "Pendekatan dalam Analisis Sistem Politik", 3.

yang bersifat *textural description*. Melalui objek penelitian tersebut, peneliti akan menggali informasi terkait agar diperoleh suatu data dan informasi yang akurat mengenai gejala sosial politik dalam proses demokrasi yang terjadi di Sudan Selatan.

2. Desain Penelitian

Desain penelitian yang dirancang dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *arkeologi* dan *genealogi*. Metode arkeologi yakni desain penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan serta meringkas berbagai kondisi, situasi dan berbagai variabel yang muncul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi. Metode arkeologi bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai motif, makna dan kepentingan dibalik suatu peristiwa, dengan kata lain mencari variabel-variabel yang terkait dan tersembunyi. Melalui metode genealogi, dapat dilihat sebab-akibat antara variabel bebas (politik identitas politik di Sudan Selatan) dengan variabel terikat (arah demokrasi dan instabilitas sistem pemerintahan Sudan Selatan).

3. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini adalah proses dan arah demokrasi ditengah gejala politik di Sudan Selatan. Peneliti memfokuskan pada kajian politik mengenai kompleksitas elite politik dan kelompok etnis dalam proses demokrasi di Sudan Selatan. Dengan demikian, maka peneliti dapat menemukan sebuah informasi yang dapat

dianalisis melalui teori demokratisasi oleh Jack Snyder dan teori relasi kuasa oleh Michel Foucault, terhadap Politik Identitas dan arah demokratisasi Sudan Selatan.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif berarti bahwa data yang digunakan merupakan data non-statistik. Adapun pengklasifikasian sumber data yang akan digunakan oleh peneliti, digolongkan ke dalam dua bagian, yakni:

a. Data Primer

Bahan informasi yang akan peneliti gunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini melingkupi sumber hukum yang terdiri atas peraturan perundangan-undangan, peraturan pemerintah dan keputusan presiden. sumber hukum lainnya yakni CPA, keputusan menteri, peraturan daerah, traktat serta badan hukum. Berdasarkan petunjuk dari sumber badan hukum primer di atas, maka bahan primer yang peneliti gunakan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

- 1) Konstitusi yang tercantum dalam CPA (Membangun sistem pemerintahan yang demokratis dengan mempertimbangkan keragaman budaya, etnis, ras, agama dan bahasa dan kesetaraan gender dari masyarakat Sudan dan Sudan Selatan)
- 2) Konstitusi Pasal 48 (Sudan Selatan menetapkan sistem presidensial dengan pemisahan kekuasaan); Konstitusi Pasal 122 tahun 2011 membentuk peradilan yang independen, diantaranya Pasal 143

Konstitusi Sudan Selatan membentuk Komisi Anti Korupsi; Badan Pemeriksa Keuangan (Pasal 186), Komisi Hak Asasi Manusia (Pasal 145) dan lembaga independen ideal lainnya.

- 3) Konstitusi transisi tahun 2011 Pasal 8 menjamin pemisahan agama dan politik; Konstitusi Pasal 14 (persamaan di depan hukum).
- 4) Konstitusi transisi tahun 2011 Pasal 24 (Sudan Selatan menjamin hak katas kebebasan berekspresi); Konstitusi Pasal 25 (Sudan Selatan menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul); Konstitusi Pasal 9-34 (mengatur hak-hak sipil berdasarkan standar internasional).
- 5) RUU Kemanan Nasional (NSB) tahun 2015; UU KUHP (2008); UU Otoritas Media (2013); UU Dinas Keamanan Nasional (2014).

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang memiliki fungsi sebagai bahan rujukan bagi peneliti dalam mengumpulkan informasi-informasi yang memiliki keterkaitan serta relevan dengan objek yang akan dikaji oleh peneliti. Diantaranya ialah buku-buku teks termasuk skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah serta sumber berita *online*, dan lain-lain.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan sumber data yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap sumber bahan data primer dan sekunder seperti: kamus dan ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data sesuai tata cara penelitian sehingga diperoleh data yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam memperoleh data yaitu studi kepustakaan. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka melalui pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang terkait dengan penelitian. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, maka prosedur analisis yang digunakan sebagai berikut:

1. Mengelompokkan data proses demokratisasi di Sudan Selatan;
2. Merumuskan data dan informasi tentang demokratisasi dan instabilitas sistem pemerintahan di Sudan Selatan yang diperoleh dari buku, artikel jurnal dan berita online;
3. Menganalisis kompleksitas antara elite politik dengan kekuatan etnis dalam proses demokratisasi di Sudan Selatan;
Menuliskan hipotesa akhir dari keseluruhan rangkaian analisis dampak dari arah demokrasi dan kompleksitas antara elite politik dengan kekuatan etnis dalam proses demokratisasi di Sudan Selatan.

6. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data digunakan oleh peneliti dalam penelitian tesis ini yaitu menggunakan teknik analisis Miles and Huberman. Mereka mengemukakan 3 langkah dalam analisis data, yaitu

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.⁶⁶ Melalui teknik tersebut, Peneliti menganalisis politik identitas dan arah demokrasi di Sudan Selatan.

Reduksi data berarti proses pemilihan data, pengabstrakan dan transformasi data yang terkait dengan penelitian. Setelah itu, peneliti akan menyusun data tersebut ke dalam bentuk teks naratif yang sistematis untuk mendeskripsikan hasil temuan penelitian. Langkah terakhir yaitu upaya penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan cara memikirkan ulang selama penulisan serta peninjauan ulang-ulang data-data untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif.⁶⁷

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan tesis yang berjudul *Politik Identitas dan Arah Demokrasi di Sudan Selatan*, sistematika pembahasan dalam tesis ini tersusun dalam lima bab yang terdiri dari:

Bab I : Merupakan bab yang memaparkan tentang studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, tinjauan pustakan, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Merupakan bab yang menguraikan gambaran umum terkait transformasi sosial dan politik Sudan Selatan untuk menjelaskan mengenai hal yang menjadi pemicu terjadinya demokrasi di Selatan

⁶⁶ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16.

⁶⁷ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah.*, Vol. 17, NO. 33, (Januari-Juni 2018), 91-94.

sehingga memiliki keterkaitan dengan sejarah Sudan Selatan meraih kemerdekaannya.

Bab III: Merupakan bab pembahasan yang menjelaskan tentang proses demokrasi berlangsung di tengah gejolak politik Sudan Selatan yang belum stabil.

Bab IV: Merupakan bab pembahasan yang menjelaskan mengenai kompleksitas antara elite politik dengan kelompok etnis terhadap proses demokratisasi di Sudan Selatan.

Bab V : Merupakan bab bagian akhir sekaligus penutup yang menjelaskan kesimpulan dari tesis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemicu terjadinya demokratisasi di Sudan Selatan diakibatkan oleh gencarnya Arabisasi dan Islamisasi oleh orang Utara terhadap orang-orang Selatan di Sudan Lama. Secara demografis, wilayah Utara merupakan mayoritas bangsa Arab dan Islam, sedangkan di Utara di dominasi oleh bangsa Afrika dan Kristen. Kemudian, perbudakan, penindasan dan ketidaksetaraan orang-orang Selatan menjadi isu sekunder yang menyatukan orang-orang Selatan untuk membentuk kelompok separatis dan memperjuangkan pemerintahan yang demokratis. Cita-cita demokrasi tersebut akhirnya menjadi tujuan utama dalam membangun Sudan Selatan pasca peralihan kekuasaan.

Hubungan demokratisasi dengan konflik di Sudan Selatan yang melahirkan politik identitas dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan elite politik dalam mengonsolidasikan demokrasi sehingga terjadi persaingan antarkelompok yang sengit. Jack Snyder menjelaskan fenomena tersebut melalui teori demokratisasi. Snyder mengatakan bahwa sentimen nasionalisme dan persaingan antarkelompok dalam proses demokrasi hanya akan menghasilkan konflik nasionalis. Disebutkan juga bahwa demokratisasi cenderung menghasilkan pertarungan golongan hidup-mati antara kelompok SARA akibat tujuan yang saling bertentangan. Tujuan saling bertentangan ini bisa menyebabkan konflik, sekalipun berbagai

kelompok yang bersaing tidak pernah berkelahi satu sama lain sebelum terjadi demokratisasi. Artinya, proses demokratisasi akan menjadi saluran permusuhan yang sudah mendarah daging. Disisi lain, Pemilu mempersengit persaingan antarkelompok karena melalui Pemilu, maka akan terjadi perubahan struktural yang berpotensi besar mengancam posisi kekuasaan elite. Alih-alih menumbuhkan budaya demokrasi, Pemilu di Sudan Selatan telah berkontribusi pada konflik yang terjadi di Sudan Selatan. Lebih jauh lagi, persaingan antarkelompok di Sudan Selatan didasari oleh etnis, karena masing-masing kelompok etnis berusaha untuk membuat kelompoknya berada di kelas tertinggi dengan berada di puncak kekuasaan. Hal tersebut dilakukan agar tidak mengalami penindasan oleh etnis lain. Pemikiran seperti itu dilatarbelakangi oleh budaya Sudan Selatan dimana kelompok etnis tertinggi merasa berhak atas segalanya dan berhak melakukan tirani atas kelompok etnis lain yang berada dibawah kelas mereka. Kondisi seperti itu pada akhirnya menciptakan politik identitas di Sudan Selatan. Nilai-nilai etnis yang dogmatis, sikap arogansi, intoleransi, xenophobia, ketidakpercayaan dan konflik antar kelompok etnis juga melatarbelakangi politik identitas di Sudan Selatan.

Perkembangan demokratisasi di Sudan Selatan ini masih jauh untuk dikatakan sebagai negara dengan demokrasi yang matang (MD) menurut Jack Snyder. Selain belum melaksanakan pemilu lebih dari dua kali dalam 1 dekade ini, Sudan Selatan jatuh ke dalam pemerintahan yang autokrasi. Pemilu dijadwalkan pada tahun 2015 dan 2020, namun akibat

perang saudara yang terjadi, pemilu tertunda hingga saat ini. Elite Sudan Selatan bukannya menciptakan persatuan dan perdamaian melalui demokrasi, namun justru menciptakan sentimen nasionalis, persaingan antarkelompok serta propaganda yang telah mencedeairi demokrasi. Selain itu, autokrasi SPLM dan hegemoni etnis Dinka yang telah menghasilkan perang saudara akibat politik identitas di Sudan Selatan menggambarkan demokrasi di Sudan Selatan mengalami kegagalan. Kondisi tersebut menggambarkan berbagai tantangan yang belum terselesaikan dan kontradiksi yang berkelanjutan dalam demokratisasi di Sudan Selatan. Cita-cita demokrasi pada saat kemerdekaan yang telah berusaha menyingkirkan Arabisasi dan Islamisasi serta marginalisasi di Sudan Lama tidak membawa pada perdamaian. Sebaliknya, elite yang kleptokrasi dan negara yang genosida menghancurkan harapan untuk sebuah negara demokratis, dan hanya menggantikan satu penindas dengan yang lain.

B. Saran

Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini bukanlah menjadi akhir dari pembahasan, akan tetapi menjadi sebuah topik yang akan membuka kemungkinan diskursus lebih lanjut dan lebih luas terkait politik identitas dan arah demokratisasi di Sudan Selatan. Oleh karenanya, peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan di dalam mengeksplorasi penelitian ini secara mendalam.

Peneliti berharap agar adanya pembahasan lebih lanjut serta evaluasi lanjutan terkait dengan permasalahan tersebut. Agar khazanah

pengetahuan menjadi berkembang dengan topik yang dikupas secara mendalam. Peneliti menyadari tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga diharapkan adanya tindak lanjut dalam menyempurnakan berbagai penelitian lainnya yang memiliki topik pembahasan serupa.

C. Keterbatasan Penelitian

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti menemukan bahwa demokratisasi di Sudan Selatan selama 10 tahun ini masih gagal untuk mencapai tahapan demokrasi yang matang. Ketidakmampuan elite dalam mengatasi berbagai tantangan menciptakan terhambatnya proses demokrasi di Sudan Selatan. Sumber kekacauan di Sudan Selatan itu sendiri tidak terlepas dari propaganda yang diciptakan oleh elite untuk melindungi kepentingannya membuat krisis di Sudan Selatan semakin langgeng.

Hasil penelitian ini, bukanlah satu-satunya argumentasi yang mendeskripsikan bahwa kegagalan demokrasi di Sudan Selatan dipengaruhi oleh latarbelakang etnosentris, sentiment nasionalisme, persaingan politik dan propaganda politik. Akan tetapi, ada beberapa faktor lainnya yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain dalam melanggengkan krisis politik dan ekonomi di Sudan Selatan, sebagaimana yang telah diulas oleh peneliti pada pembahasan sebelumnya. Kendati demikian, peneliti tidak menutup kemungkinan bahwasanya

terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan politik identitas dan kegagalan demokrasi di Sudan Selatan.

Di dalam penelitian ini, peneliti menyadari bahwa masih terdapat kekurangan baik dari segi metodologi penelitian yang dilakukan secara virtual maupun pengumpulan data yang berbasis analisis konten atau isi yang diambil dari media online lainnya. Peneliti berharap adanya tindak lanjut dalam pengembangan demokrasi di Sudan Selatan yang dilakukan secara *field research* atau penelitian lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Cunningham, Frank. *Theoris of Democracy: A critical Introduction*, (Taylor and Francis e-Library, 2002).
- Heywood, Andrew. *Politik Global*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).
- Martel, Peter. *First Raise a Flag: How South Sudan Won the Longest War but Lost the Peace*, (Oxford University Press).
- Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992).
- Pinaud, Clemende. *War and Genocide in South Sudan*, Cornell University Press (2021).
- Raleigh, Clionadh and Dowd, Caitriona. *Sudan and South Sudan January 2015*, (Armed Conflict and Event Data Project, 2015).
- Sahide, Ahmad. *The Arab Spring: Tantangan dan Harapan Demokratisasi*, (Jakarta: PT. Media Kompas Nusantara: Jakarta, 2019).
- Simon, Roger. *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2004).
- Snyder, Jack. *Dari Pemungutas Suara ke Pertumpahan Darah: Demokratisasi dan Konflik Nasionalis*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramdia, 2003).
- Themmer, Anders (Ed). *Warlord Democrats in Africa: Ex-military leaders and electoral politics*, (London: Zed Books, 2017).
- Vaughan, Christoper dkk. *The Borderlands of South Sudan: Authority and Identity in Contemporary and Historical Perspectives*, Palgrave Series in African Borderlands Studies.
- James, Laura M. *حقول السيطرة : النفط وال (لا) أمن في السودان وجنوب السودان*, (Nbmedia: Swiss, 2015).

JURNAL

- Alkatiri, Zeffry. "Perdebatan Teori Transisi Demokrasi", *Jurnal Wacana.*, Vol. 9, No. 1, April 2007.
- Anggradinata, Langgeng Prima. "Konsep Kegilaan dan Kekuasaan Michel Foucault Dalam Cerpen "Catatan Harian Orang Gila" Karya Lu Xun", *Jurnal Wahana.*, Vol. 1 No. 13, 2017.
- Awolich, Abaraham A. "Federalism In South Sudan: Laying the Foundation for Acceptable, Responsive, and Inclusive Governance", *The Sudd Institute*.
- _____. "Fixing Governance is key to Stability in South Sudan", *Policy Brief*, Desember 2018.
- Bhasoan, Aminah. dan Kotarumalos, Amir Faisal. "Praktek Relasi Wacana dan Kuasa Foucaultian dalam Realis Multi Profesi di Indonesia", *Jurnal Populis.*, Vol. 8 No. 1, Maret 2014.
- Boswell, Allan . "Conflict and Crisis in South Sudan' Equatoria", *United States Institute of Peace*, No. 493, April 2021.
- Cahyati, Putri. "Analisis Konflik Sudan dan Sudan Selatan Pasca Referendum Pemisahan Diri Sudan Selatan dari Sudan", *Journal of International Relations.*, Vol. 3, No. 4, 2017.
- Chukujekwu, Stephen Chijoke dan Iloanya, Peter Chukwuemeka., "As Inquiry Into the Concept of the African Personality (Person) as a Social-Self", dalam *Philosophy Study*, Vol.10, No.12, Desember 2020.
- Deng, David. "Priorities for Peace in South Sudan", dalam *Policy Brief, Conflict Research Programme*, Agustus 2020.
- Fintel, Marisa von dan Ott, George "Political Culture and Participation in South Africa: The Role of Socio-Economics Factors", dalam *Taiwan Journal of Democracy*, Vol.13, No.1, Juli 2017.
- Frahm dan Ole, "Defining the Nation: National Identity in South Sudanese Media Discourse", dalam *Africa Spectrum, GIGA German Institute of Global and Area Studies*, 47, 1, 2012.
- gbor, Julius dan Taiwo, Olumide. "South Sudan: One Year After Independence", *The Brookings Africa Growth Initiative*.

- Haynal, Cleo. "Tension between the Sudans: Not Just Oil, but a Lack of Foresight", *Counter Terrorist Trends and Analyses*, Vol. 5, No. 7 July 2013.
- Jager, Nicola de dan Steenakamp, Cindy., "The changing political culture of the African National Congress", dalam *Democratization*, 25 Juni 2015.
- Johnson, Douglas H. "The Political Crisis in South Sudan", Cambridge University Press, *African Studies Review*, Vol. 57, No. 3, Desember 2014.
- Kamahi, Umar. "Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik", dalam *Jurnal Al-Khitabah.*, Vol. III, No. 1, Juni 2017.
- Kebung, Konrad. "Membaca 'Kekuasaan' Michel Foucault Dalam Konteks 'Kekuasaan' di Indonesia", *Jurnal Melitas.*, Vol. 33 No. 1, 2017.
- Kimenyi, Mwangi S. "Making Federalism Work in South Sudan", *The Brookings Africa Growth Initiative*.
- Knopf, Payton. "South Sudan's Civil War and Conflict Dynamics in the Red Sea", dalam *US Institute of Peace*, 2018.
- Kon, Madut. "Institutional Development, Governance, and Ethnic Politics in South Sudan", *Journal of Global Economics*, Vol. 3, No. 2, 2015.
- Koos, Carlo dan Gutschke, Thea. "South Sudan's Newest War: When Two Old Men Divide a Nation", *German Institute of Global and Area Studies*, Number 2, 2014.
- Manobo, Blazio M. "African Personality: An Anthropological Perspective for Leadership Development in Africa", dalam *Africology: The Journal of Pan African Studies*, Vol.12, No. 4, October 2018.
- Mansfield, Edward D. dan Snyder, Jack "Democratization and War", *Foreign Affairs.*, Vol. 74, No. 3, Mei-Juni 1995.
- Mbaku, John Mukum dan Smith, Jessica Elaine. "South Sudan: One Year After Independence", *The Brookings Africa Growth Initiative*.
- Moro, Leben dkk. "Statebuilding and legitimacy: Experiences of South Sudan", *Feinstein International Center*, Januari 2017.

- Mudhoffir, Abdil Mughis. "Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik", *Jurnal Sosiologi MASYARAKAT.*, Vol. 18, No, Januari 2013.
- Mutasa, Charles dan Virk, Kudrat. "Challenges Facing South Sudan's Transitional Government of National Unity", *centre for Conflict Resolution*, 2017.
- Nugroho, Kris. "Konsolidasi Demokrasi", *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik.*, Th. XIV, No. 2, April 2001.
- Nyadera, Israel Nyaburi. "South Sudan conflict from 2013 to 2018: Rethinking the causes, situation and solution".
- Pendle, Naomi. "Competing Authorities and Norms of Restrain: Governing Community-embedded Armed Groups in South Sudan".
- Priyanto, Joko. "Wacana, Kuasa dan Agama dalam Kontestasi Pilgub Jakarta Tinjauan Relasi Kuasa dan Pengetahuan Foucault", *Jurnal Thaqaifiyyat.*, Vol. 18 No. 2, Desember 2017.
- Raliegh, Clionadh dkk. "Country Report: South Sudan Conflict Update July 2016", *Armed Conflict Location and Event Data Project 2016*.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah.*, Vol. 17, NO. 33, Januari-Juni 2018.
- Rosyana, Firda Windy Dermawan, Akim. "Pendekatan Negosiasi Konflik dalam Resolusi Konflik di Sudan Selatan", *Jurnal ICMES.*, Vol. 3, No. 1, Juni 2019.
- Sayyoh, Loway. "آثار الص عا الدولي عمى النفط في جنوب السودان سياسياً و اقتصادياً دي", *Tishreen University Journal Eco. & Leg. Sciences Series*, Vol. 14, No. 1, 2019.
- Setyanyo, Arief. "Faktor Penyebab Konflik Pasca Sudan-Sudan Selatan Tahun 2011-2012", *Junral Analisis Hubungan Internasional*, Vol.2, No, 3, September 2019.
- Storaas, Guri. "Participation on Paper but nt in Practice? The South Sudan Constitutional Review Process", *International Development Research Centre* dalam Berghof Foundation Operations GmbH 2015.
- Supardan, Dadang. "Sejarah dan Prospek Demokrasi", *Social Science Education Journal.*, Vol. 2, No.2, 2015.

- Syahputra, Iswandi. "Post Media Literacy; Menyaksikan Kuasa Media Bersama Michel Foucault", *Jurnal ASPIKOM.*, Vol 1 No. 1, Juli 2010.
- Syarifiuddin, Arif. "Pengaruh Kekuasaan Atas Pengetahuan: Memahami Teori Relasi Kuasa Michel Foucault", *Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam*, Vol. 18, No.2, 2018.
- Talbott, Strobe. "Democracy and the National Interest", *Foreign Affairs*, Vol. 75, No. 6, Nov-Des 1996.
- The Carter Center, "Observing the 2011 Referendum on the Self-Determination of Suothern Sudan".
- Toft, Monica Duffy. "A Legitimacy chain approach to security sector reform: Working for citizens and states", *The LSE-Oxford Commission on State Fragility, Growth and Development*, April 2018.
- Verhoeven, Harry. "Understanding the Implications of South Sudan's", *Independence, e-International Relations*.
- Vhumbunu, Clayton Hazvinei. "The Formation of the Revitalized Transitional Government of National Unity in South Sudan: Key Priorities, Tasks and Challenges Ahead", No.2, Juni 2020.
- Walender, Akinyi R. "Engendering Response to Complex Emergencies: Lessons from South Sudan", *PRISM*, Vol. 6, No, 1, *women, peace and insclusive security*, 2016.
- Wangke, Humhrey. "Masyarakat Sipil dan Transisi Demokrasi di Timur Tengah", *Info Singkat Hubungan Internasional.*, Vol. VI, No. 03, Februari 2014.
- Watkins, Kevin. "South Sudan: One Year after Independence", *The Brokings Africa Growth Initiative*.

WEB

Ayek. Morris. 6 Juli 2018. “Kenapa Perang Saudara di Arab Tidak Akan Pernah Berakhir?“, <https://www.dw.com/id/kenapa-perang-saudara-di-arab-tidak-akan-pernah-berakhir/a-44548317>.

Bbc.com. 9 Juli 2011, “Sudan Selatan Resmi Merdeka” terdapat dalam https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/07/110709_sudanselatan.

cia.gov

Freedomhouse.org, “South Sudan”, dalam <https://freedomhouse.org/country/south-sudan/freedom-world/2020>.

International Crisis Group, “السودان: اجأخر أبيع من نفق الأزمات”, Laporan Afrika, No. 47, 12 Oktober 2007,

John Mutenyo, “South Sudan: Time to Focus on Challenges”, dalam <https://www.brookings.edu/opinions/south-sudan-time-to-focus-on-challenges/>.

Kuol, Luka, “كوول لوكا بقلم”, “السودان في إقليمياً الفاعلة للجهات المتنافسة المصالح بين التنقل”, dalam <https://africacenter.org/ar/spotlight/navigating-the-competing-interests-of-regional-actors-in-south-sudan/>.

Lipi. 04 Februari 2011. “Referendum Penutup Konflik Sudan”, <http://www.politik.lipi.go.id/ose-fileman/kolom/kolom-1/politik-internasional/403-referendum-penutup-konflik-sudan>.

News.okezone.com. 01 April 2021. “Serangan di Sudan Selatan Tewaskan Hampir 30 Orang”, <https://news.okezone.com/read/2021/04/01/18/2387854/serangan-di-sudan-selatan-tewaskan-hampir-30-orang#>

Republika.com, “Islam di Sudan Selatan Minoritas di Negeri Termuda”, <https://www.republika.co.id/berita/p9fsm313/islam-di-sudan-selatan-minoritas-di-negeri-termuda>.

Rosen, Armin. “The Bygone Hope of South Sudan”, dalam <https://www.the-american-interest.com/2018/02/15/bygone-hope-south-sudan/>.

Un.org

USAID. 2020. “Democracy, Human Right, and Governance Assesemnet of South Sudan”.

Voaindonesia.com. 02 April 2021. “5 Tewas dalam Serangan di Jalan Sudan Selatan”, <https://www.voaindonesia.com/a/tewas-dalam-serangan-di-jalan-sudan-selatan/5837361.html>

Worldbank.org.

